

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Orang Lintas Negara

Ine Armilia¹, Andi Aina Ilmih²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Email: inaarnilia@gmail.com¹, andiaina@unissula.ac.id²

Abstract:

Human smuggling is a complex and deeply troubling issue that transcends national borders, posing significant challenges to law enforcement and human rights protection worldwide. This article explores the multifaceted aspects of human smuggling, including the factors driving it, law enforcement efforts to combat it, and the protection of human rights for its victims. The discussion begins by examining the factors that fuel human smuggling, such as economic instability, conflict, climate change, and political and social factors. These drivers lead individuals to seek better opportunities outside their home countries, often falling prey to traffickers in the process. Subsequently, the article delves into the legal frameworks at both national and international levels governing human smuggling and the role of law enforcement agencies in prevention and prosecution. Collaboration among nations is highlighted as crucial in addressing this transnational crime effectively. Furthermore, the importance of protecting the human rights of smuggling victims is emphasized. This includes providing comprehensive rehabilitation and reintegration services, ensuring access to legal protection and justice, and the active involvement of civil society organizations in supporting victims. In conclusion, the article underscores the need for coordinated efforts at the global, national, and community levels to combat human smuggling effectively. By addressing its root causes, strengthening law enforcement measures, and prioritizing victim protection, we can work towards creating a safer and more just world for all.

Abstract

Penyelundupan orang merupakan masalah yang kompleks dan sangat mengkhawatirkan yang melampaui batas-batas negara, menimbulkan tantangan signifikan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Artikel ini mengeksplorasi berbagai aspek dari Penyelundupan orang, termasuk faktor-faktor yang mendorongnya, upaya penegakan hukum untuk melawannya, dan perlindungan hak asasi manusia bagi para korban. Diskusi dimulai dengan mengkaji faktor-faktor yang mendorong Penyelundupan orang, seperti ketidakstabilan ekonomi, konflik, perubahan iklim, dan faktor politik dan sosial. Faktor-faktor ini mendorong individu untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, sering kali jatuh ke tangan para penyelundup dalam prosesnya. Selanjutnya, artikel ini mendalami kerangka hukum di tingkat nasional dan internasional yang mengatur Penyelundupan orang dan peran lembaga penegak hukum dalam pencegahan dan penuntutan. Kolaborasi antar negara ditekankan sebagai krusial dalam mengatasi kejahatan lintas batas ini dengan efektif. Selain itu, pentingnya melindungi hak asasi manusia bagi para korban Penyelundupan orang disorot. Ini termasuk penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif, memastikan akses terhadap perlindungan hukum dan keadilan, dan keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam mendukung korban. Sebagai kesimpulan, artikel menegaskan perlunya upaya terkoordinasi di tingkat global, nasional, dan komunitas untuk memerangi Penyelundupan orang secara efektif. Dengan mengatasi akar penyebabnya, memperkuat langkah-langkah penegakan hukum, dan memprioritaskan perlindungan korban, kita dapat bekerja menuju menciptakan dunia yang lebih aman dan adil untuk semua.

Article History

Received June 15, 2024
Revised June 25, 2024
Accepted June 30 2024
Available online 12 July, 2024

Keywords :

Human smuggling, Law enforcement, Protection, Human rights

Keywords:

Penyelundupan manusia, Penegakan hukum, Perlindungan, Hak asasi manusia



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736671>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Penyelundupan orang lintas negara merupakan salah satu masalah global yang mengkhawatirkan yang telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Fenomena ini melibatkan kegiatan ilegal memindahkan orang dari satu negara ke negara lain dengan cara yang tidak resmi dan seringkali berbahaya. Penyelundupan orang terjadi karena berbagai alasan, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, konflik politik atau sosial, dan perubahan iklim yang memengaruhi kondisi hidup. Orang-orang yang terlibat dalam penyelundupan seringkali merupakan korban yang rentan, seperti migran

gelap, pengungsi, atau individu yang mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain (Jastisia, 2018).

Penegakan hukum terhadap penyelundupan orang merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Karena jalur-jalur penyelundupan seringkali tersembunyi dan terorganisir dengan baik, sulit bagi otoritas untuk mengungkap dan menangani kasus-kasus ini secara efektif. Selain itu, kurangnya kerjasama internasional juga menjadi hambatan dalam upaya menangani penyelundupan orang lintas Negara (Lilipaly, 2023).

Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama internasional yang kuat dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara sangatlah penting. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan orang dan konsekuensinya. Melalui pendidikan dan advokasi, kita dapat membantu mencegah orang jatuh ke dalam jaringan penyelundupan dan menyediakan dukungan bagi korban yang telah terkena dampaknya. Penyelundupan orang lintas negara adalah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang (Nurdiyanto, 2020).

Dalam upaya menangani penyelundupan orang, penting untuk memperhatikan perlindungan hak asasi manusia bagi para korban. Korban penyelundupan sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang serius akibat dari eksploitasi dan perjalanan yang sulit. Oleh karena itu, mereka memerlukan akses terhadap layanan rehabilitasi, kesehatan, psikososial, dan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia mereka. Pencegahan penyelundupan orang juga memerlukan pendekatan yang holistik. Hal ini termasuk upaya untuk mengatasi akar masalah yang mendasari penyelundupan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik, dan ketidakstabilan politik. Dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik, meningkatkan akses terhadap pendidikan, dan mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial, kita dapat mengurangi kerentanan terhadap praktik penyelundupan (Lilipaly, 2023).

METODE PENULISAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kepustakaan atau studi literatur. Hal ini berarti penulisan artikel ini didasarkan pada tinjauan dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset, dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terpercaya. Melalui pendekatan ini, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu penyelundupan orang lintas negara berdasarkan pada temuan-temuan dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para pakar dan peneliti terkemuka dalam bidang ini (Pringgar, 2021).

LANDASAN TEORI

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau asal usul sosial. Hak ini diberikan kepada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Definisi ini menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki nilai inheren dan martabat yang sama, tidak peduli dengan status atau kondisi sosialnya. Hak asasi manusia mencakup beragam hak yang penting untuk kehidupan yang layak dan berharga. Ini termasuk hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Selain itu, hak asasi manusia juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan yang memadai (Hakim, 2022).

Namun, hak asasi manusia bukanlah konsep yang statis. Definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan perubahan dalam tuntutan kemanusiaan dan tantangan baru yang dihadapi manusia. Di era globalisasi ini, masalah-masalah seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik bersenjata menghadirkan tantangan baru dalam pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil memiliki peran penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu di wilayahnya, sementara

organisasi internasional seperti PBB memiliki peran dalam mempromosikan kerjasama internasional dan mengawasi pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia. Masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam memperjuangkan hak asasi manusia melalui advokasi, pendidikan, dan aksi langsung (Imran, 2019)

Hubungan Antara Hak Asasi Manusia Dan Penyelundupan Orang

Hubungan antara hak asasi manusia dan penyelundupan orang merupakan sebuah dinamika yang rumit dan seringkali bertentangan. Penyelundupan orang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga sering kali terjadi karena ketidakmampuan atau kegagalan sistem perlindungan hak asasi manusia yang ada. Salah satu hak asasi manusia yang paling sering dilanggar dalam praktik penyelundupan orang adalah hak atas kebebasan dan martabat. Individu yang diselundupkan sering kali diperlakukan sebagai barang dagangan, dengan tidak adanya kebebasan untuk memilih atau menentukan nasib mereka sendiri. Mereka sering kali menghadapi kondisi hidup yang tidak manusiawi, seperti penahanan ilegal, pemerasan, dan eksploitasi seksual (Lilipaly, 2023).

Selain itu, penyelundupan orang juga melanggar hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Korban penyelundupan sering kali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan, pemerasan, dan pelecehan fisik maupun psikologis. Mereka juga sering kali dieksploitasi secara ekonomi, dengan dipaksa untuk bekerja dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi atau tanpa pembayaran yang layak. Namun demikian, tidak semua kasus penyelundupan orang adalah hasil dari pelanggaran hak asasi manusia. Terkadang, individu secara sukarela menggunakan jasa penyelundup untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau untuk melarikan diri dari keadaan yang berbahaya di negara asal mereka. Namun, dalam banyak kasus, penyelundupan terjadi karena ketidakmampuan atau kegagalan sistem perlindungan hak asasi manusia yang ada, seperti akses terbatas terhadap sistem perlindungan suaka atau kurangnya kesempatan ekonomi yang memadai (Manurung, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mendorong Penyelundupan Orang

Penyelundupan orang menjadi fenomena yang kompleks dan meresahkan, yang dipicu oleh berbagai faktor yang mendorong individu untuk mencari jalan keluar di luar batas negara mereka. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama penyelundupan orang. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas dapat mendorong individu untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di negara lain. Kondisi ini memicu gelombang migrasi yang besar, di mana orang-orang mencari pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi di luar negeri, terutama jika mereka tidak memiliki kesempatan yang sama di negara asal mereka (Sari, 2014).

Konflik bersenjata, perang saudara, dan kekerasan politik atau etnis di negara asal juga menjadi pendorong kuat bagi penyelundupan orang. Kondisi ini mengakibatkan orang-orang menjadi pengungsi, terpaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di negara lain. Mereka sering kali terpaksa menggunakan jasa penyelundup untuk melarikan diri dari bahaya dan mendapatkan perlindungan yang lebih aman di tempat lain. Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis, dapat menyebabkan kerugian besar terhadap sumber daya alam, pertanian, dan infrastruktur di negara-negara tertentu. Akibatnya, orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat yang lebih aman dan berkelanjutan untuk hidup. Penyelundupan orang menjadi salah satu cara untuk mencari perlindungan dari bencana alam dan mencari kondisi hidup yang lebih baik (Pandapotan, 2023).

Kemajuan dalam teknologi dan komunikasi telah membuat penyelundupan orang menjadi lebih terorganisir dan lebih sulit untuk dideteksi. Jaringan penyelundup menggunakan teknologi modern, seperti internet dan media sosial, untuk merekrut korban, mengatur rute perjalanan, dan menghindari penegakan hukum. Ketersediaan jalur migrasi yang aman dan legal juga mempengaruhi tingkat penyelundupan orang. Jika individu memiliki akses yang mudah dan aman untuk bermigrasi secara legal, mereka mungkin tidak akan menggunakan jasa penyelundup. Oleh karena itu, kebijakan imigrasi yang ketat dan kurangnya jalur migrasi yang aman dapat memaksa individu untuk bergantung pada penyelundup untuk mencapai tujuan migrasi mereka (Jastisia, 2021).

Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Orang

Penyelundupan orang merupakan kejahatan transnasional yang serius dan meresahkan yang

mebutuhkan penegakan hukum yang tegas dan efektif di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, hukum pidana biasanya mengatur penyelundupan orang sebagai kejahatan serius yang diancam dengan hukuman yang berat. Hukum tersebut biasanya meliputi larangan terhadap pemindahan orang melintasi batas tanpa izin yang sah, eksploitasi manusia, perdagangan orang, dan kejahatan terkait lainnya. Di tingkat internasional, berbagai perjanjian dan konvensi telah dirumuskan untuk mengatur dan memerangi penyelundupan orang, seperti Konvensi PBB tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual (Ilmih, 2017).

Lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam mencegah dan menangani kasus penyelundupan orang. Mereka bertanggung jawab untuk mengungkap jaringan penyelundup, menyelidiki kasus-kasus penyelundupan, menangkap pelaku, dan menyelamatkan korban. Langkah-langkah ini melibatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, petugas keimigrasian, dan pihak berwenang lainnya, serta bekerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan orang, mengingat sifat lintas batas dari kejahatan ini. Negara-negara seringkali bekerja sama dalam hal pertukaran informasi, pelatihan petugas penegak hukum, dan koordinasi tindakan penegakan hukum lintas batas. Selain itu, organisasi internasional, seperti Interpol dan Europol, juga berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dan memobilisasi sumber daya untuk memerangi penyelundupan orang secara efektif (Lilipaly, 2023).

Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan orang, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kompleksitas dan fleksibilitas jaringan penyelundup yang sering kali melintasi batas negara dengan mudah. Hal ini mempersulit upaya penegakan hukum untuk mengungkap dan menangani kasus penyelundupan orang secara efektif (Ilmih, 2018).

Penting untuk memastikan bahwa semua upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan orang dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang tertangkap dalam jaringan penyelundupan, termasuk hak atas kebebasan, privasi, perlakuan yang adil, dan akses terhadap bantuan hukum dan kesehatan. Penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia memastikan bahwa korban tidak menjadi korban kedua dalam upaya memerangi kejahatan ini. Dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperkuat pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan orang, kita dapat meminimalkan dampak negatif praktik ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan. Dengan kerja sama internasional yang solid, penerapan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kita dapat membangun dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang (Pandapotan, 2023).

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Penyelundupan Orang

Penyelundupan orang sering kali mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, sehingga melindungi dan mendukung korban menjadi sebuah keharusan moral dan hukum. Upaya perlindungan hak asasi manusia bagi korban penyelundupan orang melibatkan sejumlah langkah penting yang bertujuan untuk memastikan pemulihan mereka secara menyeluruh dan pengakuan atas hak-hak mereka. Pertama-tama, korban penyelundupan orang membutuhkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif. Ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan psikososial, perumahan yang aman, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Layanan ini membantu korban untuk pulih dari traumatisasi yang mereka alami selama perjalanan penyelundupan, serta membantu mereka untuk mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan layak (Jastisia, 2021).

Perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan juga sangat penting bagi korban penyelundupan orang. Ini termasuk akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas, perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan, serta akses terhadap proses peradilan yang adil dan efektif. Korban harus diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian mereka dalam proses hukum, tanpa takut akan balasan atau pemulangan paksa ke negara asal. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam mendukung korban penyelundupan orang. LSM dapat menyediakan layanan langsung kepada korban, termasuk penempatan sementara, konseling, dan bantuan hukum. Mereka juga dapat melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih baik dalam hal perlindungan korban penyelundupan orang, serta memberikan pelatihan kepada petugas penegak

hukum dan penyedia layanan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi oleh korban (Jastisia, 2021).

Melalui upaya perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa korban penyelundupan orang diperlakukan dengan martabat dan mendapatkan pemulihan yang layak dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Ini juga merupakan bagian penting dari upaya lebih luas untuk memerangi penyelundupan orang dengan mengurangi permintaan untuk jasa penyelundupan dan meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terlibat (Ilmih, 2017).

Selain menyediakan layanan rehabilitasi dan perlindungan hukum, penting juga untuk mencegah korban penyelundupan orang dari pengalaman yang sama atau eksploitasi lanjutan. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat membuat korban rentan terhadap penyelundupan ulang atau eksploitasi lebih lanjut, serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memegang peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia bagi korban penyelundupan orang. Kampanye pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan penyelundupan orang, mengurangi stigma terhadap korban, dan mengidentifikasi tanda-tanda penyelundupan potensial (Kuswardini, 2021).

SIMPULAN

Penyelundupan orang adalah masalah serius yang dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi yang buruk, konflik dan kekerasan, perubahan iklim, dan faktor politik dan sosial. Faktor-faktor ini mengarah pada migrasi yang tidak teratur dan menyebabkan individu mencari jalan keluar di luar batas negara mereka. Untuk menangani fenomena ini, penegakan hukum yang kuat diperlukan di tingkat nasional dan internasional. Hal ini melibatkan perumusan dan penerapan hukum yang efektif, serta kerja sama antarnegara dalam hal pengungkapan jaringan penyelundup, penangkapan pelaku, dan perlindungan korban. Namun, perlindungan hak asasi manusia bagi korban penyelundupan orang juga penting. Ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi, perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, dan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat. Dengan memperkuat pendekatan yang holistik dan berkoordinasi dalam menangani penyelundupan orang, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia semua individu dihormati dan dilindungi, serta menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang.

SARAN

Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara dalam menangani penyelundupan orang, melibatkan pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi tindakan penegakan hukum lintas batas, dan pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan negara-negara dalam melawan jaringan penyelundup. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif penyelundupan orang. Kampanye pendidikan dan informasi publik dapat membantu mencegah individu dari menjadi korban penyelundupan dan mengurangi permintaan untuk jasa penyelundup.

REFERENSI

- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi* 18 (4):869-97.
- Ilmih, A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135-148.
- Ilmih, A. (2018). Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Values That Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). *The 4 Rd International Conference And Call For Paper Faculty Of Law 2018 Sultan Agung Islamic University*
- Imran, Z. (2019). Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 (7): 25-39.
- Jastisia, M., & Ariska, D. I. (2021). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Imigran Suriah. *Yustitia*, 7(2), 148-158.
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka Di Indonesia. *Dauliyah Journal Of Islamic And International Affairs*,

6(1), 191–220.

- Lilipaly, N.F., Tuhulele, P., & Daties, D.R. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(7), 651–663.
- Manurung, K.T. (2021). Kerjasama Imigrasi Indonesia Dengan International Organization For Migration (Iom) Dalam Upaya Menangani Imigran Gelap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 (2)
- Nurdiyanto, A., & Krismiarsi. (2020). Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal. *Aris. Juristic*, 1(1).
- Pandapotan, Y. W. (2023). Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2600–2606.
- Pringgar, R., & Sujatmiko, B. (2021). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu : Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317- 329.
- Saragih, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal JSM Law Review*, Vol. 4 (1)
- Sari, O. F. (2014). Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar). *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).